

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL JEPANG– KOREA SELATAN

Dalam bab ini, penulis membagi pembahasan menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan pada era pra modern, dan sub bab kedua membahas tentang hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan pada era pasca modern. Sub bab pertama akan memaparkan mengenai hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan, mulai dari awal mula sejarah terbentuknya hubungan bilateral kedua negara, Konflik yang terjadi antara dalam hubungan bilateral kedua negara, serta dinamika hubungan bilateral yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Selanjutnya pada sub bab kedua akan memaparkan mengenai hubungan bilateral kedua negara pasca berakhirnya perang dunia ke dua.

A. Hubungan Bilateral Jepang – Korea Selatan Era Pra Modern

1. Awal pembentukan hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang berada di kawasan Asia Timur. Secara geografis keduanya saling berbatasan. Dari segi geografis, Jepang adalah sebuah Negara kepulauan yang pulaunya memiliki jumlah sekitar 4000 pulau, baik besar maupun kecil, dengan total luas wilayahnya sekitar 370.000 km². Kepulauan Jepang terletak di belahan bumi sebelah Utara dan terpisah dari dataran Benua Asia. Terbangun dari Selatan mulai dari daerah kepulauan Okinawa yang berbatasan dengan

Taiwan dan di sebelah Utara berbatasan dengan Rusia. Di sebelah Barat berbatasan dengan laut Cina dan sebelah timur berbatasan dengan lautan Pasifik. Sedangkan Korea secara keseluruhan merupakan wilayah yang terletak di ujung timur benua Asia, yang terdiri dari semenanjung Korea dan 3.305 pulau disekitarnya. Wilayah keseluruhan dari Korea memiliki luas 220.000 kilometer persegi, dimana luas dari negara Korea Selatan adalah 98.000 kilometer persegi, sedangkan sisanya adalah wilayah milik Korea Utara. Wilayah Korea berbatasan langsung dengan Sungai Yalu dan Tamen di bagian utara, dan dikelilingi dengan perbatasan dengan laut di bagian timur dan barat. (Hoom & Moon, 2001)

Gambar II. 1 Peta Jepang - Korea



Sumber : <http://www.emapsworld.com>

Sadar akan kondisi geografis negaranya, sebagai negara kepulauan yang letaknya terpencil dari daratan benua Asia, membuat kedua negara baik Jepang maupun Korea Selatan memiliki semangat bertahan hidup yang tinggi dan selalu bekerja keras untuk membangun negaranya menjadi negara yang maju. Kedua negara juga melakukan hubungan internasional untuk memperkuat negaranya, dan mendekati diri dengan negara-negara lain di masyarakat internasional. Menurut Soong Hoon Kil dan Chung-in Moon (Hoon & Moon, 2001), secara letak geografis, semenanjung Korea secara tradisional menjadi jembatan penghubung antara benua Asia (Cina) di Utara dengan wilayah Jepang di Selatan.

Terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi sejarah bagi hubungan Jepang dan Korea. Awalnya Korea hanya dianggap sebagai jembatan kultural di wilayah Asia Timur, lalu kemudian Korea mulai menjalin hubungan dengan negara luar, termasuk Jepang. Di lain pihak, Jepang mulai menganggap Korea sebagai negara yang berpotensi di Asia Timur, karena secara geopolitik kedua negara ini berdekatan. Negara Jepang dan Korea menjalin hubungan diplomasi sejak tahun 1392 dimana pada saat itu, Chosun, mendirikan *Kingdom of Great Chosun* (Korea). Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan pada awalnya didorong oleh penyebaran budaya, dimana semenanjung Korea berfungsi sebagai jembatan kultural untuk menyebarkan seni budaya dari China Daratan menuju ke Kepulauan Jepang. Hal ini berlangsung hingga Abad ke 16, dimana Semenanjung Korea masih dianggap sebagai satu-satunya jalur yang dapat menghubungkan Jepang dan Korea Selatan.

Diplomasi pertama yang dilaksanakan oleh Dinasti Chosun disebut dengan *neighborly relations* (Eungi, 2010). *Neighborly Relations* dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan posisi atau wilayah *Kingdom of Great Chosun* di Semenanjung Korea, oleh karena itu

Chosun ingin menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, terutama dengan Jepang. *Neighborly Relations* merupakan titik awal yang menandai sejarah bagi awal hubungan Jepang dan Korea Selatan.

2. Konflik dan dinamika hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan

Setelah adanya *neighborly relations* tersebut, peristiwa yang menjadi sejarah bagi hubungan Jepang dan Korea ini kemudian terjadi lagi pada tahun 1592–1598. Hubungan Jepang dan Korea yang awal mulanya tenang, namun mulai memanas ketika militer kekaisaran Jepang melakukan invasi ke Semenanjung Korea sebanyak dua kali, dimana invasi ini dipimpin langsung oleh jenderal angkatan laut kekaisaran Jepang pada waktu itu, Toyotomi Hideyoshi. Invasi ini menjadi titik awal memburuknya hubungan bilateral antara kedua negara.

Tujuan invasi tersebut sebenarnya adalah untuk menaklukkan China, dan menurut kekaisaran Jepang pada waktu itu, Korea dianggap sebagai ‘batupijakan’ untuk menaklukkan China (Tumbull, 2002). Invasi yang juga menjadi invasi terbesar di Korea sebelum era modern, mengakibatkan kerusakan yang besar, karena pada saat itu Jepang telah menghancurkan sebagian besar kota di Korea. Invasi yang dilakukan oleh militer kekaisaran tersebut masuk ke wilayah Korea melalui jalur laut. Namun dilain sisi, Dinasti China pada waktu itu, Dinasti Ming, melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah jatuhnya Korea ke pendudukan kekaisaran Jepang. Mereka melakukan perlawanan terhadap invasi yang dilakukan oleh kekaisaran Jepang tersebut. Dengan adanya bantuan dari Dinasti Ming, pada akhirnya membuat invasi tersebut gagal dimenangkan oleh Jepang.

Setelah kegagalan invasi tersebut, pada tahun 1868 Jepang kemudian mengalami restorasi, yang selanjutnya disebut dengan Restorasi Meiji. Adanya tekanan kuat kepada pemerintahan pada waktu itu membuat sistem pemerintahan yang berada di bawah Shogun Tokugawa berhasil dilumpuhkan. Tekanan itu berasal dari adanya kudeta terhadap kekuasaan Shogun, dimana kudeta ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kekuasaan Kaisar Matsuhiro Meiji. Hal ini menjadi titik balik dalam sejarah kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Bangsa Jepang. Pemerintah Jepang mulai membuka diri dengan dunia luar dan memungkinkan masuknya budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi asing khususnya teknologi yang berasal dari wilayah barat. Masuknya budaya asing tersebut berdampak pada perubahan pola pikir dan perilaku Bangsa Jepang dalam menghadapi perkembangan internasional maupun regional. Restorasi ini membuat Jepang mulai berusaha untuk menyaingi kemampuan barat, menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih bekerja dengan giat untuk mengejar ketertinggalannya.

Setelah adanya perubahan besar pada tahun 1867 tersebut, pemerintahan Jepang kembali secara resmi melakukan hubungan bilateral dengan Kerajaan Chosun (Korea). Pembentukan kembali hubungan bilateral kedua negara ini berlangsung setelah 9 tahun Jepang mengalami Restorasi Meiji, tepatnya pada tahun 1876, dimana hubungan bilateral ini ditandai dengan Perjanjian Ganghwa atau *Treaty of Ganghwa*. Perjanjian Ganghwa adalah perjanjian resmi secara modern pertama yang terjalin antara kedua negara ini, sebelum akhirnya Korea mulai membuka jalan untuk menjalin hubungan dengan dunia luar. Setelah Kerajaan Chosun (Korea) membuka hubungan dengan dunia luar, akhirnya Amerika, Qing Cina, dan negara-negara Eropa mulai masuk dan mulai membangun hubungan diplomatik dengan Kerajaan Chosun (Korea). Salah satu contohnya adalah Rusia yang mendapatkan hak

atas penebangan kayu dan Amerika Serikat mendapat hak atas pemasangan rel kereta api antara Kota Seoul dengan Kota Incheon(Mas'ood & Seung-Yoon, Politik Luar Negeri Korea Selatan; Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional, 2004).

Dengan adanya *Treaty of Ganghwa*, membuat Jepang mulai berambisi untuk bersaing dengan bangsa Barat. pemerintahan Jepang melakukan beberapa strategi pada waktu itu, salah satunya adalah meningkatkan teknologi dan kekuatan militernya agar mampu mengimbangi kekuatan mereka, dan tentu saja hal ini dapat dicapai dengan kondisi negara dan rakyat yang makmur. Selain itu, Jepang juga tidak ingin dipandang oleh bangsa barat seperti negara lainnya di Asia. Untuk mencapai hal ini, Jepang ingin menjadikan wilayah Korea sebagai wilayah penyangga atau *buffer zone* mereka.

Keinginan Jepang untuk menjadikan Korea sebagai *buffer zone*-nya memiliki suatu tujuan khusus, dimana jika Korea dapat menjadi wilayah penyangga bagi Jepang, maka Jepang mampu menghadapi kekuatan Rusia di Asia Timur pada saat itu. Dampak dari sikap agresif Jepang tersebut menimbulkan konflik diantara Kekaisaran Qing (Cina) dan Jepang di wilayah Korea. Akhirnya pada tahun 1894 – 1896 terjadilah Perang Sino Jepang, dan berakhir dengan kekalahan Kekaisaran Qing terhadap Jepang (Prihantono, 2013).

Adanya persaingan dengan negara-negara barat yang juga ingin menguasai wilayah Semenanjung Korea, mendorong Jepang untuk menguasai Kerajaan Chosun (Korea) secara keseluruhan. Awalnya pemerintahan Jepang hanya mendapatkan hak pemasangan rel kereta api antara Kota Seoul dengan Pelabuhan Busan serta hak atas penambangan emas, dan hak penangkapan ikan di sekitar perairan Semenanjung Korea. Namun kemudian Jepang memutuskan untuk memonopoli seluruh Kerajaan

Chosun (Korea) dan menyingkirkan orang-orang Eropa yang juga masuk dan menguasai beberapa wilayah.

Keinginan Jepang untuk menguasai wilayah Semenanjung Korea secara keseluruhan tersebut di tentang oleh pihak Rusia, yang pada akhirnya mengakibatkan Perang Rusia – Jepang selama satu tahun yakni pada tahun 1904–1905. (Eungi, 2010). Dalam perang itu, Jepang berhasil mengalahkan Rusia, dan menghasilkan Perjanjian Eulsa pada tahun 1905, yang menetapkan Semenanjung Korea sebagai wilayah penyangga atau buffer zone bagi negara Jepang dan menguasai sepenuhnya semenanjung Korea. Dengan adanya hal ini Jepang dianggap oleh negara barat sebagai negara yang memiliki kekuatan militer kuat dan mulai diperhitungkan sebagai lawan yang tangguh di Asia.

Setelah menaklukkan semenanjung Korea secara keseluruhan, pada tahun 1910 Jepang dapat menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri Korea, atau dengan kata lain, Jepang mulai melakukan kolonisasi terhadap Korea. Penjajahan Jepang atas Kerajaan Chosun (Korea) pada saat itu berlangsung selama kurang lebih 35 tahun, terhitung mulai tahun 1910 sampai tahun 1945. Jepang secara efektif menduduki Korea melalui perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Selama penjajahan, walaupun Jepang membantu pembangunan Korea dengan membangun jalan dan jaringan komunikasi modern, namun kehidupan rakyat Korea mengkhawatirkan (Lew, 2000). Hal ini dikarenakan sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang dan ekspor tanaman yang dilakukan Jepang menyebabkan kekurangan pangan di Korea. Jepang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Korea dengan memanfaatkan makanan, ternak, dan logam dari Korea untuk tujuan perang dan pertahanan Jepang (Cahyo, 2012). Sebenarnya, tujuan utama Jepang dalam kolonisasi ini adalah untuk membangun Pemerintah Penjajahan Jepang di Korea, dan ingin menjadikan Semenanjung Korea sebagai

bagian dari Jepang. Langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu salah satunya adalah dengan melarang masyarakat Korea untuk menggunakan *Hangeul* atau huruf Korea, bahkan bahasa Korea pun tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam berbicara sehari-hari. Selama penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, tentara Jepang juga banyak mengeksploitasi sumber daya Korea, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Ada dua tahap penting yang dilakukan Jepang sebagai kebijakan penjajahan Jepang terhadap Korea, yang pertama adalah masa awal tekanan Jepang terhadap Korea yang berlangsung dari akhir abad ke 18 hingga awal abad ke 19, dan tahap kedua yang terjadi pada akhir abad ke 19 hingga pecahnya Perang Dunia II.

1) Tahap awal (akhir abad 18 – awal abad 19)

Pada tahap ini, penjajahan Jepang ditandai dengan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap Korea yang dilakukan oleh Jepang. Salah satu contohnya adalah ketika Jepang melakukan perdagangan dan tukar menukar barang dengan para pedagang Korea, namun dilakukan secara tidak seimbang. Masuk ke awal abad 19, para kapitalis Jepang juga ikut melakukan eksploitasi ekonomi, dengan alasan perdagangan bebas. Dengan adanya hal ini, Jepang sangatlah diuntungkan karena mendapat keuntungan yang begitu besar. Di lain pihak, menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Korea. Sayangnya, eksploitasi perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Jepang saja. Selain pemerintahan Jepang yang menganggap sah perdagangan ini, sebagian pegawai Kerajaan Chosun pun ikut membantu pihak Jepang dengan cara mengekspor barang-barang hasil industri Jepang ke

Korea dengan harga yang mahal dan mengimpor bahan-bahan mentah dari Korea namun dipatok dengan harga yang sangat murah. (Mas'ood & Seung-Yoon, Politik dan Pemerintahan Korea; Sejarah Politik Korea, 2010)

2) Tahap kedua (akhir abad 19 – Pecahnya PD II)

Pada tahap ini penjajahan Jepang tidak hanya dalam sektor perdagangan baik ekspor maupun impor barang industri saja, namun lebih terfokus pada penanaman modal di Korea. Penanaman modal ini dilakukan oleh para kaum kapitalis yang memonopoli keuangan di Jepang pada waktu itu. Mereka melakukan berbagai strategi yang bertujuan untuk menyelamatkan modal yang ditanam di Korea. Cara yang dilakukan Jepang adalah dengan memperketat berbagai aturan kebijakannya di Korea, baik secara politis maupun secara militeris. Bersama dengan kaum feodal Korea, mereka memasukkan nilai-nilai kapitalisme dalam tradisi masyarakat Korea. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan modernisasi di Korea.

Setelah Jepang dapat mengontrol perekonomian di Korea dan menguasainya secara utuh, secara perlahan Jepang mulai menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat di Korea. Tujuan utama Jepang adalah untuk menguasai seluruh wilayah Semenanjung Korea, maka Jepang memulai strateginya dengan cara memasukkan struktur masyarakat Jepang ke dalam struktur masyarakat Korea.

Dilain sisi, ketika Jepang masih terfokus untuk mengurus berbagai wilayah jajahannya, pada tanggal 23-26 bulan November, serta tanggal 3-7 bulan Desember tahun 1943, pada saat Perang Dunia II masih berlangsung, digelar sebuah pertemuan yang diadakan di Kairo dan dihadiri oleh para pemimpin dari pihak Blok Sekutu. Pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat

pada waktu itu, Franklin Delano Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, serta Presiden China Chiang Kai-Sek ini bertujuan untuk membahas hal yang perlu dilakukan seandainya Jepang kalah dalam peperangan dan berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada orang-orang Korea 'pada waktunya' (Irsan, 2007). Stalin juga ikut menunjukkan dukungannya terhadap deklarasi ini pada Juli 1945, ketika ia menandatangani Deklarasi Postdam (Lew, 2000). Hasil dari pertemuan ini adalah disepakatinya *Cairo Declaration* atau Deklarasi Kairo, yang intinya adalah menyatakan bahwa ketika Jepang telah kalah dalam perang maka Jepang tidak lagi memiliki hak atas wilayah yang telah dikuasainya dengan menggunakan kekuatan militer setelah tahun 1895. Hal ini berarti semenanjung Korea juga termasuk didalamnya, dan menjadikan semenanjung Korea sebagai wilayah yang bebas dan merdeka, atau *in due course* (Prihantono, 2013).

Pada penghujung Perang Dunia II, Jepang mulai tidak sanggup bertahandalam perang berlarut-larut melawan Amerika Serikat dan Sekutu. Peristiwa historis berupa penjatuhan bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 membuat pemerintah Jepang berupaya mencari cara untuk mengakhiri perang yang terjadi. Pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, menandai Perang Dunia II berakhir, dan Jepang harus mengakui kekalahannya dan melepaskan wilayah yang berada dibawah kekuasaannya, termasuk semenanjung Korea. Tidak lama setelah itu, Amerika Serikat segera merealisasikan isi dari pertemuan yang dilakukan di Postdam, pada tanggal 11 Agustus 1945. Perintah ini berisi bahwa seluruh pasukan Jepang yang masih berada di Utara garis paralel ke 38 harus menyerahkan diri kepada Soviet,

sedangkan yang beradadi Selatan garis paralel ke 38 akan takluk kepada Amerika. Sejak kemunduran Jepang, Uni Soviet mendaratkan pasukannya di Korea dari arah Utara yang selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat yang mendaratkan pasukannya dari arah selatan sebagai upaya untuk mencegah salah satu pihak menguasai seluruh semenanjung Korea(Henneka, 2006).

Berakhirnya kekuasaan Jepang atas Korea, membuat rakyat Korea gembira sekaligus merasakan kecemasan tersendiri. Pasalnya, walaupun mereka sudah terbebas dari penindasan yang dilakukan oleh Jepang, mereka tetap cemas karena negara mereka harus terbagi sepanjang garis 38 derajat Lintang Utara (*38th parallel*) menjadi dua zona pendudukan militer yang berbeda. Garis tersebut dirancang oleh para pembuat kebijakan AS di Washington sebagai cara terbaik untuk mencegah Uni Soviet menempati seluruh semenanjung Korea. (Lew, 2000). Presiden AS, Harry Truman, membuat perjanjian dengan Marsekal Joseph Stalin dan menjamin untuk tetap mengormati garis 38 derajat Lintang Utara tanpa berdiskusi dengan Korea. Setelah itu, pasukan pendudukan AS di Seoul menyelenggarakan pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea (*United States Army Military Government in Korea/USAMGIK*) dan mulai memerintah Korea Selatan selama tiga tahun dengan mendapat dukungan dari Partai Demokrat Korea. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1948, Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat memerdekan diri sebagai sebuah negara dengan nama resmi *Republic of Korea* (ROK) dan diakui PBB sebagai pemerintahan yang sah. Semenara itu, Uni Soviet juga mendukung berdirinya pemerintahan di Pyongyang dan menghasilkan kemerdekaan Korea Utara dengan nama resmi *Democratic People Republic Korea* (DPRK) pada 9 September 1948 (Yukhoon, 2007)

B. Hubungan Bilateral Jepang – Korea Selatan Era Modern

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka berdirilah dua negara berdaulat. Pada dasarnya, setelah terbelahnya Korea, baik Korea Selatan maupun Korea Utara diliputi ketegangan, baik ketegangan di bidang militer, maupun ketegangan yang ditimbulkan oleh konfrontasi yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyatukan kembali kedua Korea. Konfrontasi militer pasca kemerdekaan yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan perpecahan, dimana puncaknya adalah Perang Korea yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1950. Awal dari perpecahan ini adalah ketika pasukan militer Korea Utara secara tiba-tiba menyerang dan melintasi perbatasan garis 38 derajat Lintang Utara, yang merupakan garis batas antara wilayah Korea Utara dengan Korea Selatan yang telah disepakati oleh kedua negara sebelumnya. Penyerangan ini didukung oleh rezim Kim Il Sung, pemimpin Korea Utara pada waktu itu, yang juga mendapat dukungan dari Uni Soviet dan China. (Yukhoon, 2007).

Penyerangan ini merupakan awal mula dari Perang Korea, dimana perang ini berlangsung dari 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini disebut sebagai *proxy war* (perang yang dimandatkan) antara Amerika Serikat beserta sekutunya dari Blok Barat dengan Republik Rakyat China (RRC) dan Uni Soviet dari Blok Timur. (Cahyo, 2012)

Pasca penyerangan, Dewan Keamanan PBB merespon tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut. Dengan suara bulat, DK-PBB mengecam invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan tersebut melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Menanggapi respon dari PBB tersebut, pihak Korea Utara kemudian mengajukan perundingan gencatan senjata pada 10 Juli 1951 di Kaesong, wilayah Korea Utara bagian selatan, namun

berakhir dengan kegagalan. Gagalnya negoisasi tersebut melahirkan negoisasi gencatan senjata yang kedua, dimana berlangsung dua tahun kemudian dan bertempat di Panmunjon (perbatasan kedua Korea). Proses negoisasi berjalan sulit. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan sulit tercapainya proses gencatan senjata ini, salah satunya kepentingan dan perbedaan ideologi antara negara-negara tersebut. Namun akhirnya, pada 27 Juli 1953, Amerika Serikat, China, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Dari pihak Korea Selatan, Syngman Rhee menolak menandatangani perjanjian tersebut, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Walaupun begitu, secara resmi, perang antara kedua Korea ini belum berakhir. (Cahyo, 2012)

Bagi pihak Korea Selatan, dalam menghadapi konflik dengan Korea Utara, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Korea Selatan adalah dengan cara memperkuat pertahanan di bidang militer. Hal ini dikarenakan Korea Utara adalah salah satu negara yang sudah memiliki kekuatan militer yang kuat, karena Korea Utaramendapat dukungan dari negara sekutunya di Blok Timur. Untuk memperkuat negaranya, Korea Selatan mulai mencari sekutu terdekat di wilayahnya. Jepang merupakan negara terdekat dalam regional Asia Timur. Walaupun Jepang pernah menjajah dan meninggalkan luka akibat kolonialisme di wilayahnya, Korea Selatan menganggap langkah ini sebagai langkah baik, karena setelah Jepang hancur pada perang dunia ke dua, Amerika sebagai negara kuat juga ikut menjalin hubungan yang erat dengan Jepang.

Pandangan Korea Selatan agar menjalin hubungan dengan Jepang sangatlah tepat. Dari sisi Jepang, Perang Dunia II yang berlangsung selama tahun 1936-1945 merupakan perang terbesar sejarah kehidupan manusia, yang juga mengakibatkan kehancuran sangat besar dan menelan korban sampai jutaan jiwa. Selain itu, pasca

Perang Dunia II, kondisi di Jepang pada saat itu memasuki periode yang disebut periode setelah perang, Politik luar negeri Jepang terhadap Asia pada waktu itu, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi negaranya. Kondisi ekonomi di Jepang yang kacau setelah perang dunia II berakhir dapat dengan cepat bertumbuh, dengan bantuan Amerika yang meningkatkan ekonominya menjadi negara industri dan sangat maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Timur. Selama itu juga, setelah empat puluh tahun sejak bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki politik luar negeri Jepang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dasar Perdana Menteri Shigeru Yoshida.(Gordon, 1993).

Shigeru Yoshida melihat kondisi Jepang sangatlahterpuruk pada masa itu, baik secara politik maupun secara ekonomi. Secara politik dapat dilihat dari daerah-daerah jajahan Jepang yang lepas, secara ekonomi, terlihat dalam *hyperinflasi* yang terjadi dari pertengahan tahun 1945 sampai awal tahun 1949. (Yoshihara, 1983). Untuk mengatasi hal ini, Yoshida memiliki beberapa pemikiran yang ia implementasikan dalam membangun Jepang. *Yoshida Doctrine* ini lebih bersifat *inward looking*, yaitu bagaimana Jepang harus bangkit dari keterpurukan dengan cara membangun kekuatan dalam negeri terlebih dahulu, dengan lebih memfokuskan pembangunan negerinya kepada pembangunan perekonomian dalam negeri Jepang.

Dalam doktrin ini, terdapat dua garis besar tujuan yang ingin dicapai, yaitu rekonstruksi dan perkembangan di bidang ekonomi serta pertahanan, yang dilakukan dalam taraf atau biaya yang minimum. Implementasi doktrin Yoshida dalam menata kembali perekonomian Jepang tercermin dalam pembangunan Jepang secara besar-besaran dibidang industri. Ranah ekspor industri yang menjadi seperti tujuan utama Jepang pada waktu itu adalah

elektronika, mobil, semikonduktor, dan bahan-bahan berteknologi tinggi(Potter).

Untuk menopang pembangunan Industri, Jepang memerlukan banyak sumber daya alamseperti gas alam, minyak bumi, dan bahan-bahan mentah lainnya. Untuk mencapai hal itu, Jepangmulai memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di Asia, terutama Asia Timur. Tindakannya yang berupa reparasi perang ke negara-negara Asia Tenggara dan khususnya Korea Selatan pada tahun 1950an dan 1960-an memudahkan jalan bagi perdagangan dan investasi, instrumen yang membantu memulihkan hubungan politik Jepang dengan negara tetangganya, serta negara-negara bekas jajahannya, termasuk Korea Selatan.*Yoshida Doctrine* membantu Jepang dalam merekonstruksi dan membangun perekonomian dalam negeri, meskipun tanpa menggunakankekuatan militer.

Dengan keadaan yang sama bagi kedua negara, dimana kedua negara tengah berusaha untuk membangun kembali negaranya dalam berbagai bidang, tentu memudahkan mereka dalam menjalin hubungan bilateral. Perlu digaris bawahi bahwa untuk membangun kembali hubungan bilateral kedua negara tersebut pasca perang, kerjasama ekonomi lah yang sangat berpengaruh terhadap terbangunnya kembali hubungan bilateral mereka.

Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang semakin membaik pada awal perkembangannya. Pemimpin dan petinggi pemerintahan dari kedua negara menyambut dengan baik niat kedua negara untuk bersama-sama melangkah menuju masa depan tanpa melihat dan terikat mengenai fakta sejarah kelim kedua negara di masa lalu. Namun sayangnya, masyarakat Korea Selatan masih memiliki rasa kebencian terhadap Jepang, dimana hal ini terkadang muncul jika terjadi beberapa kasus ataupun peristiwa yang menyinggung mengenai sejarah kelim

kolonialisasi di antara kedua negara tersebut. Hubungan kedua negara seringkali kembali mengalami hambatan, yang seringkali dipicu oleh permasalahan yang sangatlah sensitif, mengingat pihak Jepang memang melakukan sesuatu yang keji pada masa kolonialisme yang dilakukannya. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, salah satunya adalah masalah *Jugun Ianfu*, dan yang semakin sering muncul belakangan ini adalah mengenai sengketa pulau yang melibatkan kedua negara. Tidak hanya itu, beberapa tindakan yang dilakukan pihak Jepang pun dapat memicu kemarahan rakyat Korea Selatan, seperti kunjungan perdana menteri Jepang ke sebuah kuil yang menjadi simbol kekejaman masa kolonialisme bagi rakyat Korea Selatan, namun berbeda bagi pihak Jepang, karena kuil tersebut dianggap sebagai tempat suci yang patut dijaga dan dihormati.

Perdana Menteri Jepang pada waktu itu, Junichiro Koizumi berkunjung ke Kuil Yasukuni. Seperti kunjungan para pemimpin Jepang sebelumnya, kunjungan itu pun menuai kemarahan pihak Korea Selatan. Hubungan diplomatik Jepang dan kedua negara itu berada di ujung tanduk. Kuil Yakusuni yang berarti “negeri yang damai” itu memang menyimpan luka lama bagi Korea Selatan. Di kuil yang dibangun pada tahun 1869 itu dimakamkan sekitar 2,5 juta rakyat Jepang yang gugur selama perang berlangsung, dimana terdiri atas perawat, prajurit, dan pelajar yang maju ke medan perang. Sebagian besar orang Jepang, mereka yang dikuburkan di kuil itu adalah pahlawan sehingga patut didoakan dan dihormati. Namun berbeda bagi rakyat China dan Korea Selatan, Kuil Yasukuni dipandang tak lebih sebagai simbol kekejaman Jepang. Pasalnya, di kuil itu dimakamkan juga penjahat kelas A, seperti Perdana Menteri Jendral Hideki Tojo yang bertanggung jawab atas kekejaman Jepang selama perang dunia II. Karena itu, kunjungan para pejabat Jepang, termasuk Koizumi, seakan membangkitkan luka lama dan kenangan pahit Bangsa China dan Korea Selatan. Ratusan

ribu perempuan Korea dinistakansebagai budak seks tentara Jepang sejak tahun 1932. Tidak hanya diculik dan disekap serta diperlakukan secara keji, sebagian dari mereka pun akhirnya dibunuh. Luka lama itulahyang menyebabkan setiap kunjungan Koizumi di Kuil Yasukuni ditanggapi secara keras oleh Korea Selatan. Meraka menganggap kunjungan tersebut sebagai simbol tidakadanya penyesalan Pemerintah Jepang atas kekejaman militernya di masa lalu.

Kunjungan Koizumi yang dianggap dapat membahayakan hubungan kedua negara tersebut pada dasarnya didorong oleh fakta bahwa masih banyak rakyat Jepang yang masih terobsesi dengan sentimen nasionalisme yang diwariskan oleh kelompok garis keras nasionalis Jepang. Dengan adanya sentimen dan semangat nasionalisme yang kuat ini, mendorong beberapa masyarakat Jepang, terutama para politisinya, seperti Koizumi, memandang masih pentingnya memberikan penghormatan bagi pahlawan-pahlawan yang berjasa bagi mereka, termasuk di Kuil Yasukuni. Sentimen itu pula yang diduga membuat Jepang tidak serius mengadakan rekonsiliasidengan Korea Selatan. Jepang memang sudah menyatakan maaf dan penyesalannya diKonferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Jakarta. Namun, permintaan maaf itudianggap tidak ikhlas. Hal ini terlihat dari masih adanya upaya mengaburkan kekejaman militer Jepang dalam buku-buku pelajaran sejarah yang diajarkan oleh pemerintah Jepang kepada para pelajar di sekolah-sekolah di Jepang. Dampaknya, upaya rekonsiliasi setengah hati ini tidak berhasil dan memicu ketegangan di Korea Selatan, dimana terjadi unjuk rasa anti Jepang bahkan yang dashyat, ketika mereka mengetahui praktek pengaburan sejarah kembali dilakukan Jepang.

Apa yang dilakukan oleh pihak Jepang memang berbeda dengan Jerman yang mengakuikekejaman Adolf

Hitler. Selain mengakui kekejaman pemimpinnya pada waktu itu, Jerman juga memaparkan tragedi Holocaust secara detail disekolah-sekolah agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Pemerintah Jerman juga telah meminta maaf sehingga proses rekonsiliasi dengan bekas musuhnya berjalan mulus dan tidak meninggalkan luka sampai sekarang. Saat ini Jerman sudah bisabersekutu dengan musuh-musuh lamanya. Berbeda dengan Jerman, pemerintah Jepang dianggap tidak memiliki pendekatan politik dan tindakan yang nyata untuk melakukan rekonsiliasi. Pemerintah dan kalangan bisnis hanya melakukan pendekatan dengan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di negara-negara Asia Timur. Bagi Jepang, mereka berharap dengan cara itu, negara-negara Asia Timur akan bergantung dan tidak mengungkit masa lalu. Namun faktanya, apa yang dilakukan Jepang tidak sesuai dengan harapan para pemimpin negara tersebut.

Konflik akibat sejarah masa lalu yang berlarut-larut seperti ini tentu saja membahayakan hubungan diplomatik Jepang dengan negara tetangganya, Korea Selatan. Merespon adanya kunjungan Koizumi ke Kuil Yasukuni, Pemerintah Korea Selatan langsung mengajukan protes keras, dengan cara membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri pada waktu itu, Ban Ki-moon ke Jepang dan mungkin akan membatalkan kunjungan Presiden Roh Moo-hyun ke Jepang. Sejumlah pengamat politik internasional mengatakan, gesekan antara Jepang-Korea Selatan akan mempertajam persaingan sengit di Asia Timur.

Tidak hanya masalah kunjungan ke kuil Yasukuni, klaim yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan atas Pulau yang masih menjadi sengketa bagi keduanya dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara Asia Timur tersebut. Para pejabat Jepang mengakui hal tersebut sehingga kemungkinan dapat mengganggu rencana kunjungan masing-masing kepala pemerintahan

yang sudah dijadwalkan. Ketegangan kedua negara semakin terlihat manakala Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Sang Hee memberikan pernyataan resmi di hadapan parlemen Korea Selatan untuk mempertimbangkan opsi penempatan personil militernya di kepulauan yang disebut Dokdo oleh Korea Selatan, dan oleh Jepang diklaim sebagai Takeshima. Menanggapi reaksi tersebut, Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Nobutaka Machimura, menyerukan sikap saling menjaga ketenangan dan mengatakan bahwa aksi militer dapat saja merusak hubungan bilateral yang dibangun kedua negara selama ini. Jepang juga mengkritik keras rencana Korea Selatan yang akan menggelar latihan militer di dekat gugusan pulau yang sedang disengketakan oleh kedua negara tersebut. Tokyo bahkan memperingatkan Seoul bahwa tindakan seperti itu dapat meningkatkan ketegangan dan mencederai hubungan keduanya. Sengketa gugusan pulau yang disebut Dokdo di Korea Selatan dan Takeshima di Jepang memanas lagi setelah Jepang menegaskan kembali klaimnya terhadap pulau yang dikontrol Korea Selatan itu. Hubungan Korea Selatan dan Jepang sebenarnya terus membaik sampai isu itu muncul kembali.

Departemen Luar Negeri Korea Selatan mengatakan, Jepang dengan tegas telah kembali menyatakan kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut. Pernyataan baru mengenai kepemilikan pulau Takashima oleh Jepang yang disebut Dokdo oleh Korea Selatan dilaporkan muncul dalam sebuah buku petunjuk bagi para guru di Jepang. Dalam keterangannya, didalam buku pelajaran tersebut, selain dengan tegas Jepang mengklaim bahwa pulau tersebut menjadi milik Jepang, dijelaskan juga bahwa kepulauan itu kaya akan ikan dan juga cadangan gas, sehingga sangat penting untuk dijaga.

Merespon hal tersebut, pihak Korea Selatan melakukan protes keras dengan cara menarik Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Kwon Chul-hyun, kembali ke

Seoul untuk sementara waktu. Kementerian itu juga mengatakan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Toshinori Shigeie juga akan dipanggil. Tidak hanya itu, Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak menyampaikan kekecewaannya yang mendalam serta penyesalan atas pernyataan kedaulatan yang dilakukan oleh Tokyo, dimana Korea Selatan mengatakan hal itu muncul dalam buku petunjuk untuk guru bagi murid sekolah menengah. Presiden Lee sebelumnya berusaha menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Tokyo. Dia mengatakan KTT bersama antara kedua negara, yang pertamakali dalam tiga tahun terakhir harus dijalani dengan baik. Sementara itu di Tokyo, juru bicara Pemerintah Nobutaka Machimura mengatakan pemerintahnya berhati-hati mengenai pernyataan dalam buku itu dan menyerukan semua pihak untuk tenang sampai muncul pernyataan resmi yang dapat disepakati oleh kedua negara.

Sebenarnya, hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan semakin berjalan ke arah yang lebih baik. Namun karena adanya isu sensitifitas sejarah, membuat hubungan tersebut kembali memanas. Setelah sempat menegang karena masalah kunjungan Koizumi ke Kuil Yasukuni muncul permasalahan di wilayah Asia Timur yang mengakibatkan kedua negara harus kembali membicarakan proses normalisasi. Isu krusial tersebut adalah masalah mengenai Korea Utara. Setelah sebelumnya membatalkan kunjungan kenegaraannya, Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun meninggalkan Seoul untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan di Jepang. Kunjungan kenegaraannya kali ini merupakan sebagian dari rencana kunjungan kenegaraannya, dengan tujuan mengkoordinasi lebih lanjut pendirian dengan pemerintah Jepang mengenai penyelesaian masalah nuklir Korea Utara. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Jepang dalam strategi diplomatik Korea Selatan. Roh Moo-hyun dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi berkoordinasi dan melakukan pembicaraan lebih lanjut pendirian kedua Negara. Menurut

Pejabat dari Kepresidenan Korea Selatan, kedua belah pihak akan mengeluarkan pernyataan bersama tentang pendiriannya untuk terus menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara secara damai.

Media Korea Selatan menaruh harapan besar pada kunjungan Roh Moo-hyun yang bertolak ke Jepang kali ini. Surat kabar *Korean Time* Korea Selatan dalam editorialnya mengatakan, “Jepang adalah negara tetangga penting Korea Selatan, dewasa ini, memperbaiki dan meningkatkan hubungan kedua negara mempunyai arti penting bagi pemerintah baru Roh Moo-hyun untuk memelihara kepentingan negara Korea Selatan melalui upaya diplomatik”. Meskipun kunjungan kali ini masih tetap akan terpengaruh oleh beberapa masalah sensitif peninggalan sejarah, namun pihak Korea Selatan tetap mengharapkan kunjungan kali ini dapat mendorong momentum perkembangan hubungan bersahabat dan tetangga baik oleh kedua negara. Editorial tersebut menunjukkan pula, pembinaan hubungan saling percaya antara Korea Selatan dan Jepang adalah tugas yang paling penting, akan tetapi apabila sejumlah negarawan Jepang tidak dapat mengenal sejarah dengan tepat, pembinaan hubungan saling percaya tersebut akan sangat sulit.

Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Asia Timur, mendorong hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan untuk semakin membaik dan lebih intensif dari sebelumnya. Hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan tidak hanya berbicara mengenai kedua negara saja, karena jika dilihat dari kawasan geografisnya, banyak negara-negara kuat yang berpengaruh di wilayah regional Asia Timur. Hubungan Jepang – Korea Selatan maupun dengan negara-negara lain yang menjadi aliansinya tentu akan mempengaruhi konstelasi politik yang terjadi di Asia Timur.

C. Langkah yang ditempuh Jepang-Korea Selatan dalam proses normalisasi

Pasca Perang Dingin, kawasan Asia timur ditandai dengan berbagai konflik regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian masyarakat dunia, khususnya tentang masalah keamanan yang menyangkut kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini, seperti Jepang, China, Korea Selatan, serta Korea Utara. Adanya pembangunan kapabilitas militer negara-negara Asia Timur khususnya China dan Korea Utara membuat Jepang, Korea Selatan dan negara lain merasa terancam. Baik Jepang dan Korea Selatan sadar bahwa untuk mencapai kepentingan nasional mereka masing-masing, mereka harus mulai menggabungkan kekuatan. Satu-satunya cara agar mereka dapat beraliansi adalah dengan cara memperbaiki hubungan bilateral mereka yang sempat hancur disebabkan oleh masa lalu kedua negara. Maka dari itu, untuk memulai proses normalisasi kedua negara mulai membahas dan mencari jalan keluar berbagai permasalahan, terutama masalah inti, yang melibatkan kolonialisme yang menjadi batu sandungan terbesar bagi kedua negara untuk memulai proses normalisasi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh kedua negara adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah *Jugun Ianfu*

Jugun Ianfu ialah sebutan bagi pemerintahan Jepang terhadap wanita yang khusus mereka sediakan bagi tentara Jepang untuk memuaskan nafsu tentara mereka saat perang. Penyebaran pengaruh Jepang pada saat pendudukannya di Korea Selatan menghasilkan warga Korea Selatan yang pandai berbahasa Jepang dengan baik. Hal ini sangat disenangi tentara Jepang sehingga *Jugun Ianfu* asal Korea Selatan paling diminati oleh tentara Jepang, walaupun wanita yang dibawa oleh pemerintah Jepang bukan hanya dari Korea Selatan saja, melainkan banyak dari negara-negara jajahannya yang lain seperti Filipina dan Indonesia. Setelah perang dunia I dan perang

dunia II berakhir, isu *Jugun Ianfu* tak pernah lagi mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Korea Selatan. Namun, pihak keluarga yang anggota keluarganya pernah diculik untuk dijadikan *Jugun Ianfu* asal Korea Selatan tidak bersedia untuk diam begitu saja tanpa mendapatkan jawaban yang jelas. Mereka merasa bahwa kebenaran atas kasus penculikan keluarganyadimasa lalu yang dilakukan oleh Jepang harus membuahkan hasil yang jelas,dan pemerintah Jepang harus memintamaaf secara tulus atas kejahatan perang yang merekabuak dimasa lalu kepada keluarganya. Karena, penculikanwanita untuk dijadikan budak seks saatperang ialah perbuatan yang sangattidak bermoral dan Jepang dinilai sudahmelanggar HAM dan hukum humaniter yang ada.

Untuk merespon atas keinginan Korea Selatan tersebut, pada tahun 1995 pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataanpermintaan maaf secara resmi yangdiumumkan Perdana menteri Jepang,Tomiichi Muarayama.Sayangnya, permintaan maaf ini tidak diiringi dengan tindakan pertanggungjawaban atas perlakuan mereka terhadap*Jugun Ianfu* asal Korea Selatan, sehingga tidak sesuai dengan permintaan keluarga korban *Jugun Ianfu*.Pernyataan tersebut disambut baik oleh mantan Jugun ianfu Korea Selatannamun masih saja tidak merasa puas dengan hal tersebut karena tuntutan yang mereka ajukan ialah pertanggungjawaban pemerintah Jepang secaramoril dan materil.

Berbeda dengan tindakan pemerintahan terdahulu, pada tahun 2007, perdana menteri jepang yang baru Shinzou Abe menolak mengakui permintaan maafyang diucapkan oleh perdana menteri sebelumnya dengan dalih bahwa tindakan perbudakan seks yang terjadi hanyalah dilakukan oleh beberapa oknum yang mengambil keuntungan saat perang, sehingga bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Jelas pernyataan itu langsung menghasilkan kecaman bertubi-tubi dari rakyat Korea Selatan bagi pemerintah Jepang. Tidak hanya Korea

Selatan, semua negara bekas jajahan Jepang mengajukan protes akan tindakan Abe yang dianggap telah mungkir dari fakta sejarah dan berupaya untuk mendistorsi sejarah kebangisan masa kolonial Jepang. Naiknya permasalahan Jugun Ianfu kembali ke permukaan setelah beberapa tahun menghilang dikarenakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Korea Selatan di tahun 2011.

Karena dirasa kurang membuat pihak Jepang tergerak, beberapa aktivis di Korea Selatan menggalakkan suatu gerakan yang diberi nama *Wednesday Demonstration*. Namun nyatanya, memberikan tekanan untuk mendesak pemerintah Jepang melalui gerakan *Wednesday Demonstration* masih dirasa belum cukup oleh pemerintah Korea Selatan bersama aktivis pembela hak-hak sipil Korea Selatan. Karena dirasa kurang memberikan efek, untuk semakin membuat desakan kepada pemerintah Jepang, dewan yang mengurus masalah wanita budak sex oleh militer Jepang di Korea Selatan yang merupakan perwakilan dari pemerintah Korea Selatan bersama aktivis pembela hak-hak sipil Korea Selatan membangun sebuah patung yang mereka sebut dengan *Jugun Ianfu*. Patung ini sengaja didirikan didepan kantor kedutaan besar Jepang di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, ibukota Korea Selatan. Patung ini dibuat untuk mengingatkan pemerintah Jepang akan hak-hak wanita korban kejahatan perang Jepang yang masih belum dipertanggungjawabkan pemerintah.

Semakin mempertegas keinginan tersebut, pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, memberikan pernyataan langsung berupa desakan secara tegas terhadap pemerintah Jepang untuk segera dipertanggungjawabkan kesalahan yang pernah pemerintah mereka lakukan kepada wanita asal Korea Selatan yang telah diculik untuk dijadikan budak seks. Desakan ini begitu lantang disampaikan oleh presiden Korea Selatan sebagai pembelaan dan tindakan tegas

terhadap tuntutananya terhadap pemerintah Jepang yang belum juga memberikan respon yang diharapkan Korea Selatan terkait isu wanita korban kejahatan perang Jepang. Tidak hanya berhenti disitu saja, pada tahun 2014, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye memberikan pernyataan lebih tegas terhadap pemerintahan Jepang bahwa iadengan tegas akan menolak menemui secara langsung perdana menteri Jepang Shinzou Abe dan akan siap dengan segala konsekuensi yang ada, termasuk pemutusan hubungan diplomatik sekalipun sampai pemerintah Jepang bisa memiliki sikap yang jelas terkait isu wanita korban kejahatan perang Jepang asal Korea Selatan tersebut.

Permasalahan mengenai *jugun ianfu* ini menambah daftar pemicu konflik kedua negara. Amerika Serikat selaku sekutu bagi kedua negara merasa permasalahan *jugun ianfu* yang merupakan isu krusial bagi kedua negara ini harus segera diselesaikan karena dapat mengganggu tercapainya kerjasama trilateral yang diharapkan oleh ketiga belah pihak untuk melawan Korea Utara dalam aksi nuklirnya. Hal itu tergambar jelas ketika Korea Utara bersiap merilis rudal nuklirnya, pada April 2013, petinggi militer AS dalam kunjungannya ke Jepang secara terbuka menyampaikan rasa frustrasinya atas ketidakmampuan militer Jepang dan Korea Selatan bekerja sama dalam menghadapi ancaman tersebut.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan Jepang yang dimediasi oleh Amerika Serikat itu kemudian menghasilkan pengakuan tak terbantah dan tidak dapat diubah, berupa penandatanganan *Irreversible Agreement* yang disebut *Agreement on Comfort Women*. Dalam perjanjian ini, dengan jelas Jepang mengakui secara penuh kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dimasa lalu berupa penculikan wanita asal Korea Selatan untuk dijadikan budak seks sebagai pemenuhan kebutuhan biologis tentara

Jepang dan meminta maaf untuk semua kesalahan yang diiringi tindakan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan, dengan bentuk membangun yayasan yang secara khusus dibuat untuk mendukung korban kejahatan perang dimasa lalu agar dapat mengobati luka fisik dan psikis dengan memberikan sumbangan sebesar 1 milyar yen kepada yayasan "*comfort women foundation*" sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap kesalahan negara mereka dimasa perang dunia I dan II. (Hye). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka menjadikan perjanjian tersebut sebagai titik awal normalisasi hubungan kedua negara.

2. Penegasan Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima

Perebutan suatu kepulauan oleh beberapa negara memang menjadi masalah yang rumit. Perebutan beberapa negara terhadap suatu wilayah negara lain sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan antara negara yang sama-sama memiliki klaim atas wilayah yang sama. Sejarah persengketaan Pulau Dokdo (bagi Korea Selatan) atau Takeshima (bagi Jepang) merupakan isu yang didasari oleh sejarah kolonialisme Jepang terhadap Korea. Jepang mengklaim bahwa pulau Dokdo atau Takeshima tersebut adalah milik Jepang yang didasarkan perjanjian yang pernah disepakati oleh kedua negara pada saat masa kolonialisme.

Pulau Dokdo/Takeshima merupakan pulau yang terletak di pertengahan antara Semenanjung Korea dan Kepulauan Jepang (pada $37^{\circ} 14' 26,8''$ N dan $131^{\circ} 52' 10,4''$ E). Sebenarnya, Dokdo/Takeshima bukan merupakan suatu pulau tapi merupakan suatu gugusan pulau. Dokdo/Takeshima terdiri dari dua pulau utama, yaitu Dongdo (Pulau Timur) dan Seodo (Pulau Barat). Kawasan Dongdo adalah kawasan dengan luas sekitar 73297 m^2 , sedangkan Seodo memiliki luas sekitar 88639 m^2 , jadi total

luas kawasan Dokdo/Takeshima adalah 187.453m². Pulau ini merupakan suatu kawah yang berasal dari ledakan vulkanis yang berbentuk karang, dan sekarang dijadikan sebagai tempat perlindungan burung laut petrel, burung camar dan terdapat beberapa tumbuhan endemik lainnya di pulau ini. Pulau ini juga terkenal karena kekayaan biota laut dan sumber daya gas alam yang terdapat disekitarnya. Penampikan fisik atas Pulau ini sangat mengesankan kedua negara, sehingga dianggap mencerminkan kepribadian kedua negara secara simbolik. Sehingga muncullah perdebatan kepemilikan atas pulau Dokdo/Takeshima yang mencakup batas-batas kewilayahan secara maritim termasuk penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di dalamnya.

Salah satu alasan Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo/Takeshima berada di bawah kedaulatannya adalah berdasar pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa pulau Dokdo/Takeshima pada awalnya merupakan suatu *independent island* yang dinamakan Ussankuk, dan dianggap telah bersatu dengan wilayah Korea sejak lama, yakni sejak masa Dinasti Shilla pada tahun 512 M, dan dengan berbekal data ini, pihak Korea Selatan berani mengklaim bahwa Dokdo/Takeshima berada dibawah kedaulatannya. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini memancing kemarahan rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka.

Jepang menganeksasi semenanjung Korea sekitar tahun 1904, dikarenakan Jepang melihat melimpahnya cadangan sumber daya milik Korea, dan Jepang membutuhkan sumber daya alam Korea tersebut untuk membangun imperium Jepang yang lebih luas. Korea yang

telah tunduk oleh Jepang harus menandatangani perjanjian pendudukan yang dilakukan dengan Jepang pada tanggal 22 Agustus 1910. Berdasarkan hal tersebut, secara otomatis Korea berada dalam kendali Jepang. Sebelumnya pada tahun 1904, Korea menandatangani sebuah perjanjian dengan Jepang. Pada perjanjian itu, Korea mutlak dalam kendali Jepang dalam berbagai hal, termasuk mengenai segala urusan diplomatik dan pemerintahan Korea yang berada dibawah kekuasaan Jepang, serta Korea menjamin untuk memberikan wilayahnya kepada Jepang jika dibutuhkan untuk kebutuhan perang Jepang.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, secara otomatis wilayah yang dulu menjadi wilayah jajahan Jepang dan berada dibawah otonomi nya dikembalikan kepada negara/wilayah yang berkuasa sebelumnya. Hal ini tertuang dalam perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan perjanjian San Fransisco yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951, yang didalamnya memuat berbagai hal, seperti pasal-pasal yang menunjukkan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan yang dilakukannya. Selain itu, dalam perjanjian San Fransisco juga tertuang pasal tentang wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal.

Namun, walaupun Jepang menandatangani perjanjian tersebut, akan tetapi berdasarkan pada perjanjian San Fransisco, wilayah kepulauan Dokdo/Takeshima tidak termasuk kedalam wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang. Pada perjanjian tersebut, tepatnya pasal 2 perjanjian San Fransisco, hanya dibicarakan mengenai pengembalian wilayah Pulau Kuril dan Senkaku pada Rusia. Hal ini dapat juga diartikan sebagai legalitas bagi Jepang untuk memiliki dan mengklaim pulau Dokdo/Takeshima sebagai wilayahnya. Untuk mempertegas masalah ini, pada tahun 2012, Jepang

mengajukan masalah sengketa Pulau Takehima/Dokdo ini ke Mahkamah Internasional, namun ditolak oleh pihak Korea Selatan. Pemerintahan Korea Selatan dengan jelas menyatakan bahwa permasalahan Pulau Dokdo tidak akan diangkat menuju Mahkamah Internasional terlebih dahulu. Korea Selatan sebelumnya akan lebih memfokuskan pada pengumpulan dokumentasi yang menunjukkan bukti serta pengumpulan petakepemilikan wilayah Korea Selatan yang dapat dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa pulau Dokdo/Takeshima merupakan bagian dari wilayah Korea Selatan. Dengan perlakuan Korea Selatan ini, membuat satu permasalahan kedua negara teratasi dan membuat proses normalisasi berjalan lebih baik lagi.

3. Diterapkannya kebijakan Korea Selatan yang mendorong hubungan Jepang – Korea Selatan semakin membaik

Politik luar negeri Korea Selatan mengalami berbagai macam perubahan yang cukup signifikan dari setiap periode pemerintahan presidennya. Perubahan ini terjadi karena dari setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki pandangan politik luar negeri yang berbeda-beda. Selain itu, perubahan yang terjadi juga didorong sikap setiap pemerintahan memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda pula, sehingga arah dan kebijakan dari sebuah pemerintahan dengan pemerintahan yang lain pun berbeda.

Bagi hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan, “angin segar” normalisasi mulai terasa ketika Park Geun Hye terpilih sebagai presiden ke-11 Korea Selatan. Ia terpilih sebagai presiden pada Desember 2012 dan dilantik menjadi presiden perempuan yang pertama di Korea Selatan. Park Geun Hye dinilai unik, karena kebijakannya berbeda dengan kebijakan luar negeri beberapa presiden

Korea Selatan sebelumnya. Presiden Park Geun-hye menerapkan kebijakan luar negeri baru yang ia sebut dengan *Trustpolitik Policy*. Kebijakannya ini memiliki *Grand strategy* yang didalamnya memiliki tiga pilar, antara lain kebijakan pertahanan dan keamanan yang kuat, memastikan pelaksanaan *trust diplomacy*, dan membangun rasa saling percaya dalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea. Presiden Park Geun-hye menekankan kebijakan ini akan menjadi “tambang emas” tidak hanya untuk semenanjung Korea tetapi juga untuk seluruh wilayah Asia Timur Laut dan di luar wilayah Asia Timur.

Secara umum, kebijakan politik luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye adalah membangun hubungan dengan menumbuhkan kepercayaan antar negara. Dengan kebijakannya tersebut, kebijakan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang menjadi kebijakan politik luar negeri Korea Selatan yang dianggap akan berbeda dan cukup special karena hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang selama ini terjalin selalu mengalami pasang surut yang disebabkan isu sejarah masa lalu, berupa imperialisme Jepang yang meninggalkan trauma mendalam untuk Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan juga memberlakukan diplomasi dua jalur atau *two track diplomacy* terhadap Jepang. *Two track diplomacy* yang dimaksud disini adalah memisahkan hubungan pemerintah yang terjadi pada saat ini dari masalah sejarah yang berasal dari pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea. Korea Selatan akan tetap menempatkan fakta-fakta sejarah pada tempatnya seperti dengan meminta Jepang untuk meminta maaf pada masyarakat Korea Selatan atas kekejaman imperialismenya dimasa lalu, akan tetapi tetap menjaga hubungan kerjasama bilateral dengan baik tanpa terbelit masalah yang ada.

Perilaku Korea Selatan dapat dikatakan melunak pada masa pemerintahan presiden Park, karena pada masa pemerintahannya, perjanjian *Jugun Ianfu* berhasil

disepakati. Selain itu, Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang masih dalam bayangan masa lalu dan terus diperbaiki dengan berusaha menyelesaikan persoalan satu persatu. Hubungan kedua negara juga semakin bergerak kearah yang lebih baik ketika Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills*. Dengan diberlakukannya hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Korea Selatan pasti menyadari pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini akan berimplikasi pada hubungan bilateral kedua negara.

Implikasi dari pemberlakuan *Japan's New Security Bills* adalah tercapainya perjanjian keamanan antara kedua negara. Korea Selatan merupakan fokus Jepang dalam jangkauan keamanan regional Asia Timur dan sebagai partner pentingnya selain Amerika Serikat. Pada kenyataannya Jepang dan Korea Selatan banyak dipertimbangkan sebagai partner ideal. Hal ini dikarenakan kedua negara dapat dengan mudah melakukan *sharedvalues, geostrategic interests and outlook, hingga geography*. Terlebih lagi, kedua negara merupakan aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Berkaitan dengan *security agreement* Jepang dan Korea Selatan dapat mensepakati *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* yang merupakan sebuah kesepakatan rutin yang menetapkan bentuk *military information sharing* yang tersepakati pada akhir tahun 2015, yang menjadi penegas bahwa hubungan bilateral kedua negara semakin berjalan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.